

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung

Rani Delfira¹, Ariusni²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: Ranidelfira123@gmail.com, Ariusni77@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

15 Mei 2025

Disetujui:

15 Juni 2025

Terbit daring:

25 Juni 2025

DOI: -

Sitasi:

Delfira, R. & Ariusni (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung

Abstract:

From 2014 to 2019, economic growth in Lampung Province tended to stagnate and was above the national figure. However, in 2020 it decreased by -1.66 percent due to the Covid-19 pandemic. During the recovery period from the pandemic, namely from 2021 to 2022, the recovery of economic growth in Lampung Province was slower than the national figure and had not reached the pre-pandemic figure. Meanwhile, Regional Original Income, Balancing Funds and Direct Government Expenditures tended to increase each year and were greater than the figures before the pandemic. This study aims to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, and Direct Government Expenditures on Economic Growth in Lampung Province. Using the Panel Data Regression method covering 15 districts/cities in Lampung Province from 2014 to 2022. The results of the study show that Regional Original Income and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Economic Growth. General Allocation Funds and Direct Government Expenditures have a positive and insignificant effect on Economic Growth. Revenue Sharing Funds have a negative and insignificant effect on Economic Growth. Together, Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Government Expenditure have a significant influence on Economic Growth in Lampung Province.

Keywords : *Economic Growth, Local Original Income, Balancing Funds, Direct Government Spending, Panel Data Regression*

Abstrak:

Pada tahun 2014 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung cenderung stagnan dan diatas angka nasional. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,66 persen karena pandemi Covid-19. Pada masa pemulihan dari terjadinya pandemi, yaitu tahun 2021 sampai 2022 pemulihan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih lambat dibandingkan nasional dan belum mencapai angka sebelum pandemi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Pemerintah cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya dan lebih besar dari angka sebelum terjadinya pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Menggunakan metode Regresi Data Panel yang mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Langsung Pemerintah, Regresi Data Panel*

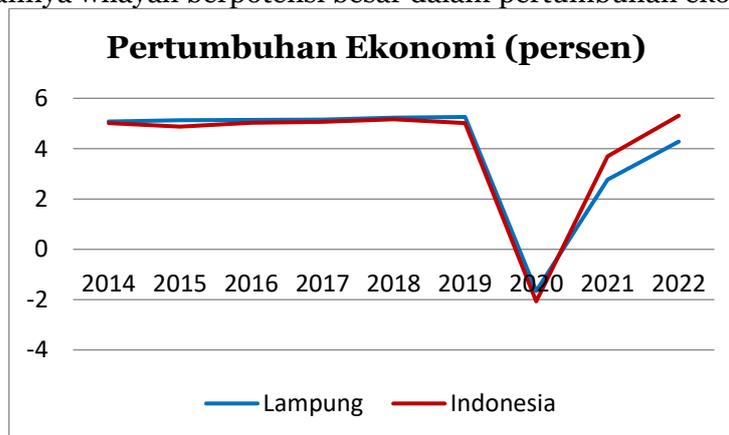
Kode Klasifikasi JEL: O47, F43, P24, C23

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kesempatan besar bagi daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah agar partisipasi daerah lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Selain meningkatkan partisipasi, otonomi daerah juga diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Otonomi daerah adalah salah satu instrumen utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberi lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan memastikan pembangunan merata di seluruh Indonesia (Bahasoan & Anwar, 2024). Menurut Keynes, untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, diperlukan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian, baik melalui kebijakan moneter (seperti pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga) dan kebijakan fiskal (termasuk pengeluaran pemerintah dan perpajakan) (Fadli et al., 2023).

Provinsi Lampung, sebagai daerah otonom, memiliki kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ekonominya, dengan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Lampung relatif tinggi, melampaui rata-rata Sumatera, meskipun perekonomian antar kabupaten/kota masih belum merata. Faktor geografis, sumber daya alam, dan sektor unggulan yang berbeda berkontribusi pada variasi PDRB di setiap daerah. Sebagai gerbang utama penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung memiliki peran strategis dalam perdagangan dan transportasi nasional, menjadikannya wilayah berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1 di atas tingkat pertumbuhan ekonomi/PDRB Indonesia dan Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung umumnya mengikuti pola pertumbuhan nasional dengan angka yang cukup sebanding, meskipun terdapat variasi di setiap tahun. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional hingga tahun 2019. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi di Lampung sebesar -1,66% pada 2020, lebih kecil dibanding Indonesia yang mengalami -2,07%. Namun, pemulihan Lampung lebih lambat, dengan pertumbuhan 2,77% pada 2021 dan 4,28% pada 2022, sedangkan Indonesia mencapai 5,31% pada 2022.

Desentralisasi fiskal memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan guna membiayai pengeluaran daerah dalam mendukung pelayanan publik. Keuangan daerah memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Semakin besar pendapatan yang diterima, semakin baik karena hal ini berdampak positif pada pembiayaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah dapat meningkatkan belanja untuk pembangunan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Meylani et al., 2019).

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Bagi Hasil
1	2014	2.274.685.572.913	1.136.053.041.000	48.851.620.000	287.581.907.000
2	2015	2.247.342.667.611	1.097.129.439.000	245.066.400.000	172.095.689.000
3	2016	2.368.796.251.247	1.321.679.032.000	1.651.557.871.000	185.475.997.000
4	2017	2.750.596.478.331	1.851.595.354.000	542.809.262.000	249.340.043.000
5	2018	2.864.235.753.079	1.854.701.094.000	745.585.220.000	216.041.063.000
6	2019	3.018.067.291.160	1.906.780.297.000	581.870.716.000	138.544.335.000
7	2020	2.842.286.479.070	1.732.551.921.000	571.540.325.000	157.793.963.000
8	2021	3.249.669.847.265	1.726.296.248.000	2.232.553.877.000	225.542.359.000
9	2022	3.678.302.295.132	1.719.175.461.000	1.251.722.552.000	253.438.084.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan ekonomi agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercapai. Cara untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan pengeluaran atau belanja. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan program pemerintah. Sementara itu, belanja langsung merupakan pengeluaran yang langsung mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (Prisilia et al., 2020). Namun, penelitian ini hanya berfokus pada belanja langsung pemerintah yaitu pengeluaran daerah yang direncanakan dan memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah.

Tabel 2 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2022 (Rupiah)

No	Tahun	Belanja Langsung Pemerintah (Rupiah)
1	2014	2.309.626.502.536
2	2015	2.106.306.263.239
3	2016	2.044.023.428.191
4	2017	2.818.713.161.361
5	2018	3.039.153.600.012
6	2019	2.457.315.916.819
7	2020	2.416.103.473.492
8	2021	2.356.202.276.832
9	2022	2.841.749.366.948

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Secara umum pendapatan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki angka yang fluktuatif, namun cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19, sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi Lampung sendiri juga mengalami penurunan yaitu -1,66 persen. Belanja langsung pemerintah pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena selama pandemi Covid-19 berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak langsung. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 merupakan masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, pendapatan daerah mengalami peningkatan yang jumlah dananya lebih besar dari dana

sebelum terjadinya pandemi Covid-19, akan tetapi Pertumbuhan Ekonomi Lampung belum mencapai angka sebelum pandemi Covid-19.

Penelitian ini penting karena dapat membantu merancang kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan perekonomian, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan memastikan bahwa belanja langsung pemerintah digunakan secara efektif untuk mendorong perkembangan ekonomi. Penelitian ini akan memperlihatkan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2014-2022. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung”.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan struktural dalam suatu wilayah yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas, beragamnya sektor ekonomi, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah selama periode tertentu. PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran (Jacob & Waibot 2022).

Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Mankiw (2003) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Sukirno (2006) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi serta perkembangan struktur ekonomi.

Berbagai teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan. Menurut teori Keynesian, peningkatan pengeluaran atau belanja pemerintah akan mendorong kenaikan pengeluaran yang direncanakan, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007). Teori Harrod-Domar menyoroti peran investasi dan tabungan dalam meningkatkan kapasitas produksi. Menurut Harrod-Domar, karena investasi meningkatkan pendapatan dan kapasitas produksi, maka laju investasi harus terus meningkat agar pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi negara bisa bertambah seiring waktu (Kristianti, 2021).

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah (Kuncoro, 2004). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pembangunan ekonomi. UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan investasi daerah, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun sektor publik lainnya, sehingga menarik lebih banyak investor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran agregat.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penulisan diperlukan data yang bersifat data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) tahun 2014-2022 dan data silang (*cross section*) 15 kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber resmi, seperti situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Menggunakan regresi data panel, dengan model yang paling tepat

digunakan adalah Random Effect Model (REM). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 12*.

Tabel 3 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wilayah, yang dilihat melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku.	Rupiah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya di Provinsi Lampung yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rupiah
Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung yang bersifat umum, yaitu tidak ditentukan penggunaannya secara spesifik oleh pemerintah pusat, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah penerima.	Rupiah
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk membiayai kebutuhan tertentu bertujuan untuk mendanai urusan daerah dalam kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional.	Rupiah
Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, dari sumber daya alam dan pajak kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Rupiah
Belanja Langsung Pemerintah	Dana yang dialokasikan secara langsung digunakan untuk menjalankan program atau kegiatan yang langsung berhubungan dengan pencapaian pelayanan publik atau sasaran pembangunan di Provinsi Lampung. Belanja ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.	Rupiah

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan data panel. Model yang digunakan dalam analisis data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + U_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana: Produk Domestik Regional Bruto (Y_{it}), Pendapatan Asli Daerah (X_{1it}), Dana Alokasi Umum (X_{2it}), Dana Alokasi Khusus (X_{3it}), Dana Bagi Hasil (X_{4it}), Belanja Langsung Pemerintah (X_{5it}), Konstanta (β_0), Error term (U_{it}), Cross-section (i), Time series (t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Tabel 4 Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X ₁ PAD	X ₂ DAU	X ₃ DAK	X ₄ DBH	X ₅ BLP
Mean	21.445.585.185.185	120.162.386.037	705.352.053.179	205.424.620.303	37.987.002.548	558.499.823.362
Median	13.636.000.000.000	76.050.778.000	621.970.133.000	196.954.595.000	31.628.576.000	508.081.985.000
Maximum	82.446.000.000.000	645.965.433.000	1.378.175.214.000	437.643.933.000	150.380.012.000	1.205.732.711.000
Minimum	2.595.000.000.000	10.373.342.000	227.314.157.000	4.702.470.000	12.903.061.000	128.817.825.000
Std. Dev.	18.514.043.276.350	130.545.133.743	265.983.328.301	97.165.418.222	21.410.326.510	203.249.668.678
Skewness	1.358468	2.428727	0.644317	0.179401	2.071312	1.265431
Kurtosis	3.952023	8.849095	2.377369	2.430387	9.312977	4.792462
Jarque-Bera	46.62049	325.1632	11.52140	2.549240	320.7095	54.10226
Probabilitv	0.000000	0.000000	0.003149	0.279537	0.000000	0.000000
Sum	2.895.154.000.000.000	16.221.922.115.000	95.222.527.179.200	27.732.323.741.000	5.128.245.344.000	75.397.476.154.000
Sum Sq. Dev.	4.59E+28	2.28E+24	9.48E+24	1.27E+24	6.14E+22	5.54E+24
Observations	135	135	135	135	135	135

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Y) memiliki nilai minimum sebesar Rp2,59 triliun pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 dan nilai maksimum Rp82,45 triliun pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022, dengan rata-rata Rp21,45 triliun dan standar deviasi Rp18,51 triliun. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) menunjukkan nilai minimum Rp10,37 miliar pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 dan maksimum Rp645,97 miliar pada Kota Bandar Lampung tahun 2022, dengan rata-rata Rp120,16 miliar serta standar deviasi Rp130,55 miliar. Variabel Dana Alokasi Umum (X₂) memiliki nilai minimum Rp227,31 miliar pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 dan maksimum Rp1,38 triliun pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019, dengan rata-rata Rp705,35 miliar serta standar deviasi Rp265,98 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (X₃) memiliki nilai minimum Rp4,70 miliar pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 dan maksimum Rp437,64 miliar pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018, dengan rata-rata Rp205,42 miliar dan standar deviasi Rp97,17 miliar. Untuk Dana Bagi Hasil (X₄), nilai minimum tercatat sebesar Rp12,90 miliar pada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022 dan maksimum Rp150,38 miliar pada Kabupaten Lampung Timur tahun 2014, dengan rata-rata Rp37,99 miliar dan standar deviasi Rp21,41 miliar. Terakhir, variabel Belanja Langsung Pemerintah (X₅) memiliki nilai minimum Rp128,82 miliar pada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 dan maksimum Rp1,30 triliun pada Kota Bandar Lampung tahun 2022, dengan rata-rata Rp558,50 miliar serta standar deviasi Rp203,25 miliar.

2. Regresi Data Panel

Pengujian regresi panel bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan memanfaatkan data yang merupakan gabungan dari data runtun waktu dan tempat. Hasil estimasi menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob	Standar Prob
C	29.84776	101.5394	0.0000	0,05
X1_PAD	2.26E-12	5.641530	0.0000	0,05
X2_DAU	5.52E-15	0.016329	0.9870	0,05
X3_DAK	1.06E-12	4.742572	0.0000	0,05
X4_DBH	-1.38E-12	-1.468183	0.1445	0,05
X5_BLP	1.26E-13	0.754381	0.4520	0,05
R-squared		0.589027		
Adjusted R-squared		0.573097		
F-statistic		36.97779		
Prob (F-statistic)		0.000000		

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 5 diatas mendapatkan hasil pengolahan data sekunder yang diolah menggunakan eviews 12, dan telah didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{LOG Y} = 29.84776 + 2.26\text{E-}12\text{X}_1 + 5.52\text{E-}15\text{X}_2 + 1.06\text{E-}12\text{X}_3 - 1.38\text{E-}12\text{X}_4 + 1.26\text{E-}13\text{X}_5 + \dots\dots\dots(2)$$

Uji t

Pengujian t-statistik bertujuan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengaruh ini diuji dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi standar, yaitu $\alpha = 0,05$. Jika probabilitas $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen secara parsial. Sebaliknya, jika probabilitas $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen secara parsial.

Nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah (X_1) adalah $0.0000 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai probabilitas Dana Alokasi Umum (X_2) adalah $0.9870 \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Nilai probabilitas Dana Alokasi Khusus (X_3) adalah $0.0000 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai probabilitas Dana Bagi Hasil (X_4) adalah $0.1445 \geq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil dengan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai probabilitas Belanja Langsung Pemerintah (X_5) adalah $0.4520 \geq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah seluruh variabel bebas dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 5 nilai probabilitas Fstatistik adalah $0.000000 < 0,05$ artinya variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja langsung pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

Koefisien Determinin (R^2)

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana total variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen atau model yang digunakan. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan nilai R^2 yaitu sebesar 0.589027, diartikan bahwa perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2014-2022 sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja langsung pemerintah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Lampung

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t-statistik sebesar 5.641530 dan nilai koefisien sebesar 2.26E-12 dengan nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,0000 \leq \text{nilai } \alpha < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti peningkatan satu satuan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2.26E-10%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa peningkatan PAD mampu mendorong aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Dengan PAD yang meningkat, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pengembangan ekonomi lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambodo & Hidayat (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Lampung

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t-statistik sebesar 0.016329 dan nilai koefisien sebesar 5.52E-15 dengan nilai probabilitas Dana Alokasi Umum sebesar $0,9870 \geq \text{nilai } \alpha > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti peningkatan satu satuan pada Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.52E-13%.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan untuk menyetarakan kapasitas keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dalam praktiknya kurang fleksibel dalam pemanfaatannya. Akibatnya, daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk merencanakan alokasi anggaran belanja sesuai dengan agenda pembangunan ekonomi mereka, sehingga anggaran tersebut sering kali tidak tepat sasaran. Situasi ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pengalokasian DAU dapat menghambat pengembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lulage et al., (2023) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmen (2021) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Lampung

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t-statistik sebesar 4.742572 dan nilai koefisien sebesar 1.06E-12 dengan nilai probabilitas Dana Alokasi Khusus sebesar $0,0000 \leq \text{nilai } \alpha 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti peningkatan satu satuan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.06E-10%. Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, karena sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya yang mendukung peningkatan kapasitas produksi daerah. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah dapat melaksanakan proyek pembangunan yang berdampak langsung pada perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andry et al., (2023) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kotabagu. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean et al (2022) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Lampung

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t-statistik sebesar -1.468183 dan nilai koefisien sebesar -1.38E-12 dengan nilai probabilitas Dana Bagi Hasil sebesar $0.1445 \geq \text{nilai } \alpha 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti peningkatan satu satuan pada Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.38E-10%.

Penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam distribusi dana yang diterima oleh daerah, yang tidak efektif dalam mendorong sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil, yang seharusnya digunakan untuk mendanai pembangunan daerah, terkadang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin atau belanja yang tidak langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing dan investasi di daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh British (2020) menunjukkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor. Dan penelitian Meylani (2019) juga menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.

Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah (X₅) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Lampung

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil Belanja Langsung Pemerintah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t-statistik sebesar 0.754381 dan nilai koefisien sebesar 1.26E-13 dengan nilai probabilitas Belanja Langsung Pemerintah sebesar $0.4520 \geq$ nilai α 0,05. Berdasarkan hasil tersebut berarti peningkatan satu satuan pada Belanja Langsung Pemerintah diperkirakan akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1.26E-11%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh rendahnya efektivitas penggunaan belanja modal, keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran, atau kurang tepatnya alokasi anggaran. Anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai, yang kurang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi produktif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prisilia et al., (2020) di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro menemukan bahwa belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ignasia (2019) menunjukkan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU dan Belanja Langsung Pemerintah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta DBH memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara bersama-sama PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, optimalisasi PAD dan peningkatan efisiensi penggunaan DAK yang strategis perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Evaluasi terhadap mekanisme distribusi DAU dan DBH diperlukan guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, belanja langsung pemerintah perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi faktor lain seperti kebijakan fiskal, investasi daerah, dan karakteristik ekonomi lokal untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, A. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Syntax Idea*, 4(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i1.1714>
- Andry Mokoginta, Daisy S.M. Engka, M. T. B. M. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(3), 284–303.
- Bahasoan, A. N., & Anwar, A. I. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 43–46. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- British Kharismanissa Islami, B. O. N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana

- Bagi Hasil (Dbh), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurismata*, 2(1).
- Fadli, Z., Siagian, A. O., Siregar, N., Amelia, D., Januardani, F. D., Mardika, N. H., Belani, S., & Jamil, M. (2023). *Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar* (C. Dr. Elfiswandi, S.E, Ak, CA, M.M (ed.); 7th ed.). CV. Gita Lentera.
- Ignasia V. Dua Kuki, Munawar, Y. P. D. (2019). Pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit*, 4(2), 14–17.
- Jacob, J., & Waibot, Z. (2022). Mengukur Output Gap Ekonomi Maluku Utara (Pendekatan Hodrick- Prescott Filter). *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 212–221. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.09>
- Karmen Marpaung, Dedi Takari, C. D. O. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Growth*, 7, 127–134.
- Kristianti, D. S. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat. *Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 90–113.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* (W. C. Kristiaji (ed.)). Erlangga.
- Lulage, J., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 229–240.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga
- Meylani M. Arina, Rosalina A.M. Koleangan, D. S. M. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & Yanuar, A. B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(April), 2200–2208.
- Priambodo, A. P., & Hidayat, N. W. (2024). Pengaruh PAD , DAU , DBH , dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 8(1), 1–14.
- Prisilia Tempone, Josep B. Kalangi, Hanly Fendy DJ, S. (2020). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 134–144.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Kedua). Kencana.